

## ABSTRAK

Akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, merupakan hak setiap warga negara. Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan beragam upaya dari beragam aspek namun masih ditemui kendala dalam akses pendidikan dimana belum seluruh masyarakat mengakses pendidikan. Penjaminan terhadap akses pendidikan tidak terlepas dari penyediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan fasilitas pelayanan dasar yang tidak sekadar sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara namun juga sebagai infrastruktur fondasi dalam pengembangan masyarakat. Sebagaimana fasilitas pendidikan tersebut merupakan fasilitas umum, pengadaan fasilitas pendidikan sangat terikat kepada kebutuhan. Pemenuhan fasilitas pendidikan idealnya harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan pengadaan untuk mencapai keadilan spasial. Keadilan spasial dalam ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan konsep pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang terikat pada dimensi geografis sehingga memungkinkan untuk diamati bagaimana pemerataan maupun kesenjangan yang terjadi dalam sebuah ruang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam penyediaan fasilitas pendidikan di Kota Semarang telah sesuai dengan kebutuhan penduduk sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan dan melihat apakah fasilitas pendidikan yang ada telah terdistribusi secara berkeadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh fasilitas pendidikan dasar dan menengah di Kota Semarang memiliki tingkat pelayanan dibawah 100% baik pada SD, SMP, serta SMA dan SMK saja maupun dengan tambahan madrasah yang sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di Kota Semarang pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Nilai pelayanan SD adalah sebesar 84,38%, SMP sebesar 84,72%, serta SMA dan SMK sebesar 81,55%. Sementara dengan tambahan madrasah yang sederajat, nilai pelayanan SD sederajat naik menjadi 97,37%, SMP sederajat naik menjadi 97,26%, dan SMA sederajat naik menjadi 89,74%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peran madrasah dalam peningkatan pelayanan fasilitas sekolah dasar dan menengah di Kota Semarang, meskipun dengan peran madrasah nilai pelayanan masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Semarang. Lulusan SD memiliki tingkat keterjaminan sebesar 97,87% untuk mengakses SMP menunjukkan bahwa tidak seluruh lulusan SD dapat mengakses SMP dari segi ketersediaan fasilitas. Apabila digabungkan dengan madrasah, nilai keterjaminan lulusan SD sederajat dalam mengakses SMP sederajat menurun menjadi 97,37%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan daya dengan peran madrasah belum sepenuhnya mengimbangi jumlah lulusan SD sederajat di Kota Semarang. Sementara nilai keterjaminan lulusan SMP dalam mengakses SMA dan SMK adalah sebesar 106,35% menunjukkan bahwa SMA dan SMK di Kota Semarang mampu untuk melayani lulusan SMP di Kota Semarang, bahkan wilayah lainnya. Apabila digabungkan dengan madrasah, nilai keterjaminan lulusan SMP sederajat dalam mengakses SMA sederajat menurun menjadi 101,94% dimana telah mampu menjamin seluruh lulusan SMP sederajat dalam mengakses SMA sederajat meskipun dengan nilai keterjaminan yang lebih rendah.

Secara agregat, layanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di Kota Semarang berada pada tingkat layanan baik, begitupula tingkat layanan agregat dengan gabungan madrasah yang masih berada pada tingkat layanan baik. Ketimpangan terhadap pelayanan fasilitas SD termasuk dalam tingkat rendah sementara pada SMP serta SMA dan SMK termasuk dalam tingkat berat. Sementara hasil analisis setelah penggabungan dengan madrasah pada jenjang SD sederajat termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah, SMP sederajat termasuk dalam ketimpangan sedang, dan SMA sederajat termasuk dalam ketimpangan berat. Hal ini menunjukan penerapan keadilan spasial dalam pelayanan fasilitas pendidikan semakin lemah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara untuk ketimpangan keterjaminan akses lulusan SD terhadap SMP termasuk dalam ketimpangan sedang dan keterjaminan akses lulusan SMP terhadap SMA dan SMK termasuk dalam ketimpangan berat. Setelah penggabungan dengan madrasah tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan dimana keterjaminan lulusan SD sederajat terhadap SMP sederajat masih berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan nilai ketimpangan yang lebih rendah. Sementara keterjaminan lulusan SMP sederajat terhadap SMA sederajat masih berapa pada tingkat ketimpangan ringan dengan nilai yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan spasial dalam keterjaminan akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih tinggi semakin lemah terhadap keterjaminan akses terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Kata kunci:** Keadilan Spasial, Ketimpangan Fasilitas Pendidikan, Pemerataan Akses